

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap peneliti relevan dengan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan Yanuarius Tae (2007) tentang “*Studi Tentang Dualisme Kepemimpinan Kepala Desa Dan Tua Adat (Farei) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Studi Kasus Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Belu*”¹. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dikarenakan **Pertama**, kepala desa tidak membina iklim kerjasama dengan tua adat (FAREI) dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Belu. **Kedua**, kepala desa tidak memberikan kesempatan kepada tua adat (FAREI) untuk menggerakkan masyarakat dan menyampaikan usul – saran atau kritik. **Ketiga**, tidak adanya saling koordinasi antara kepala desa dan tua adat (FAREI) di Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Belu.

Hasil penelitian berikutnya dilakukan oleh David Jermias Suek (2012) tentang, “*Studi Tentang Kekuasaan Elit Tradisional Dalam Pemerintahan Desa Di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*”².

Hasil peneliti menunjukkan bahwa Usif Sonba,i mempertahankan dominasinya

¹ Yanuarius Tae (2007) dengan judul suatu studi Tentang Dualisme Kepemimpinan Kepala Desa dan Tua Adat (Farei) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Studi Kasus Desa Lorotulus Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang

² David Jermias Suek (2012) dengan judul Studi Tentang Kekuasaan Elit Tradisional dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

dengan strategi reproduksi dan pertukaran modal yang dimilikinya. Bentuk strategi reproduksi yang dilakukan adalah pewarisan nama keluarga, dan relasi kekerabatan yang di bangun dari pola pernikahan. Selanjutnya, bentuk strategi pertukaran yang dilakukan adalah menguasai sumber daya yang ada seperti tanah, hutan, ternak. Keberhasilan dari strategi yang di bangun tidak terlepas dari akumulasi modal yang dia miliki, yakni ekonomi, budaya dan simbolik.

Dari hasil dua penelitian terdahulu di atas dapat dilihat persamaan yaitu sama meneliti tentang kemitraan antara pemerintah desa dengan elit lokal sedangkan perbedaan dalam penelitian adalah yang pertama. lokasi atau locus wilayah penelitian yang berbeda dimana fokus kajian wilayah peneliti adalah di Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kedua, hasil penelitian terdahulu baik Yanuarius Tae dan David Jeremias Suek masih menggunakan UU yang lama, dalam konteks ini Yanuarius Tae dan David Jeremias Suek menggunakan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

2.2. TINJAUAN TEORETIS

2.2.1 TEORI ELIT

Pengertian elit memiliki cakupan yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Istilah elit juga dikupas dalam sosiologi, dimana elit menunjukkan suatu kelompok yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, politik, ekonomi, dan agama. Orang Indonesia sejak tahun 1900 mengakui adanya dua tingkatan di dalam masyarakat yaitu rakyat jelata. Administrasi, pegawai pemerintahan, dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dianggap sebagai elit atau priyayi. Jadi yang disebut elit adalah orang yang mempunyai stratifikasi di atas rakyat jelata dan mempunyai kedudukan memimpin, memberi pengaruh, menuntun, dan mengatur masyarakat³ Ketika dilekatkan pada otoritas dan kekuasaan, maka elit mempunyai dua tipe, yaitu elit yang memerintah secara formal dan elit yang tidak memerintah secara formal. Selain itu, kata elit juga diartikan sebagai orang-orang yang menentukan dalam pemerintah.⁴

Dalam istilah Laswell, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Sementara menurut Pareto, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain, ada yang memegang kekuasaan (*Governing Elite*) dan ada yang di luar kekuasaan (*Non Governing Elite*).⁵

Menurut SP. Varma, setelah Perang Dunia I, teori-teori tentang elite, kelompok dan kekuasaan tampaknya sudah digandrungi, utamanya di

³ Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Jaya 1983). Hlm 30

⁴ *ibid*

⁵ Abdul Chalik. *Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 26

Amerika, dan masing-masing mengklaim dirinya yang paling cangguh. Teori elite misalnya menegaskan, bahwa masyarakat kenyataannya dibagi ke dalam dua bagian yang mencakup; sekelompok kecil manusia yang berkemampuan, dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah. Sementara pada sisi lain, terdapat sejumlah manusia yang ditakdirkan untuk diperintah.⁶

Konsep dasar teori yang lahir di Eropa ini mengemukakan, bahwa di dalam kelompok penguasa (*the ruling class*) selain ada elite yang berkuasa (*the ruling elite*) juga ada elite tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elite berkuasa kehilangan kemampuan untuk memerintah. Dalam hal ini, massa memegang sejenis kontrol jarak jauh atas elite yang berkuasa, tetapi karena mereka tak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bisa diharapkan mereka akan menggunakan pengaruhnya.⁷

Dalam teori elite klasik, terdapat beberapa kecenderungan yang digunakan oleh ilmuwan untuk memberikan katagori elitesebagai berikut:

a. Perspektif Psikologi.

Pandangan psikologis terhadap terhadap elite dikemukakan Vilfredo Pareto (1848-1923). Menurutnya Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan selalu merupakan aktor yang terbaik, dan merekalah yang disebut elite. Elite merupakan orang yang berhasil, dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat. Mereka terdiri dari

⁶Ibid.Hal 27

⁷Ibid.Hal 28

para pengacara, ilmuwan tokoh agama, mekanik atau bahkan mafia yang umumnya dikenal pandai dan kaya.⁸

Kemampuan menduduki posisi yang terhormat didasarkan pada atribut kemanusiaan yang melekat pada seseorang, yang ia sebut sebagai *sentiment* atau *residues*. Untuk menjelaskan tentang konsep *residues*, Pareto menggunakan teori kelas dalam masyarakat, yaitu :

- 1) *Class one*, yakni kelas yang masih berada pada tataran "*instinct of combination*", yaitu masyarakat yang bergulat pada tataran gagasan, ide dan cita-cita untuk menuju kekuasaan.
- 2) *Class two*, yakni tahap konsolidasi posisi, dalam bahasa Pareto disebut, "*the persistence of aggregates*".
- 3) *Class three*, yakni kelas yang sudah menempatkan ide, gagasan dan cita-cita tersebut secara permanen dalam sebuah perintah atau kebijakan.⁹

b. Pendekatan Organisasi.

Elite dilihat dari sudut pandang organisasi dikemukakan oleh Mosca dan Michels. Menurut Gaetano Mosca (1858-1941), orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik "penting" dan mereka yang tidak memilikinya. Gaetano Mosca menggambarkan dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk; satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu,

⁸Ibid. Hal 29

⁹ibid

sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu.

c. Pendekatan Institusi.

Pandangan ini dikemukakan oleh C. Wright Mills. Menurutnya, kekuasaan tidak sekadar ditentukan oleh peran tertentu di masyarakat, karena faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Burnham, tetapi juga faktor institusi. Apa yang disebut Mills sebagai "*the institutional landscape*" menandai adanya peran institusi yang dapat mengantarkan seseorang memperoleh kekuasaan puncak. Menurut pemikiran ini, faktor hierarki dan kedekatan personal lebih menguntungkan daripada pendekatan profesional dan ekonomi.¹⁰ Masing-masing lembaga yang ada di suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda, yang memungkinkan seseorang untuk mencapai puncak kekuasaan tanpa didasari oleh pertimbangan profesional tetapi karena pertimbangan hierarki dan kedekatan personal orang lain. Mills kemudian sampai kepada pernyataan, "*behind men's back*", bahwa dalam beberapa kasus ternyata kekuasaan juga dikontrol oleh kekuatan lain yang memiliki kemampuan lobi untuk memengaruhi kekuasaan itu. Mereka juga disebut kaum elite yang dapat memengaruhi atau merubah suatu kebijakan.¹¹

Kaum elite menurut Putnam digambarkan sebagai berikut;

- a) Pertama, secara eksternal, elite bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok. Elite bukan merupakan kumpulan individu saling terpisah-pisah, tetapi individu yang ada dalam kelompok elite saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip,

¹⁰Ibid.Hal 34

¹¹Ibid.Hal 35

dan (kadang memiliki pandangan yang berbeda), memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepentingan yang sama.

- b) Kedua, kaum elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya (self perpetuating) dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas. Pemimpin selalu memilih sendiri dari kalangan istimewa yang hanya terdiri dari beberapa orang.
- c) Ketiga kaum elite pada hakikatnya bersifat otonom, kebal gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompoknya.¹²

2.2.2 Pemimpin Formal dan Informal

Interaksi antara pemimpin dan situasi lingkungannya membentuk tipe kepemimpinan tertentu. Sedangkan proses interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya memunculkan dinamika serta hukum - hukumnya tersendiri, yang menjadi sistem interaksi dalam membentuk tokoh pemimpin dan kepemimpinan (Kartono).¹³ Selanjutnya Kartini kartono mengemukakan bahwa Aneka macam jenis kepemimpinan dalam kehidupan antara lain:

- a. Kepemimpinan formal dan informal.
- b. Kepemimpinan di bidang keagamaan, pendidikan, politik, ketentaraan, bisnis, teknik, pemerintahan, dan lain - lain.
- c. Kepemimpinan di bidang swasta.¹⁴

¹²Ibid. Hal 37

¹³ Kartono, Kartini. 1983. Pemimpin Dan Kepemimpinan. Apakah Pemimpin Abnormal itu?. Jakarta: C.V Rajawali.Hal 7

¹⁴Ibid. Hlm. 9

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi / lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi. Ciri - ciri pemimpin formal antara lain:

- a. Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu, atas dasar legitimasi formal oleh penunjukan pihak yang berwenang (ada legitimasi).
- b. Sebelum pengangkatan, ia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu.
- c. Adanya dukungan dari organisasi formal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
- d. Mendapatkan balas jasa materiil dan immaterial tertentu serta emolument (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan dan lainnya).
- e. Bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan.
- f. Apabila melakukan kesalahan, dia akan dikenakan sanksi dan hukuman.
- g. Selama masa kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, antara lain untuk:menentukan policy, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervise dan control, menetapkan sasaran organisasi dan mengambil keputusan- keputusan penting lainnya .¹⁵

Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah

¹⁵ Ibid. Hlm. 9-10

kualitas unggul, ia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Ciri- ciri pemimpin informal antara lain adalah:

- a. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin.
- b. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.
- c. Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
- d. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
- e. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
- f. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya .¹⁶

Peranan sosial pemimpin informal terlihat dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, atau berbuat sesuatu. Besarnya peranan itu sangat tergantung pada besar kecilnya dampak sosial yang disebabkan oleh kepemimpinannya, serta tinggi rendahnya status sosial yang diperolehnya.¹⁷

Status sosial pemimpin informal biasanya dicapai melalui beberapa faktor, yaitu :

¹⁶Ibid. Hlm. 10-11

¹⁷Ibid. Hlm. 11

- a. Keturunan misalnya keturunan bangsawan (darah biru), pendeta "linuwih", keluarga kaya raya, rakyat jelata, dan lain-lain.
- b. Karena ia memiliki kekayaan berlimpa-ruah yang di capainya sendiri.
- c. Taraf pendidikan yang lebi tinggi di banding dengan orang lain.
- d. Pengalaman hidup yang lebih banyak, sehingga dia memiliki kualitas dan ketrampilan teknis tertentu.
- e. Memiliki sifat-sifat karismatik dan ciri-ciri *herediter* unggul lainnya
- f. Jasa-jasa yang telah diberikan kepada masyarakat. Jadi ada partisipasi sosial yang tinggi, dan fungsinya dapat mempengaruhi serta menggerakkan massa rakyat (*function utility*).¹⁸

1.2.3. Peran Elit Tradisional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No.6 Tentang Desa

Sejatinya studi yang berkaitan dengan elit lokal telah dilakukan oleh beberapa kalangan, antara lain dilakukan oleh Abdur Rozaki (2004) dan Abdul Hamid (2006) . Studi tersebut memfokuskan pada peran yang dilakukan oleh elit lokal di tengah masyarakat, dan hubungan '*patronage*' yang tercipta dalam kaitannya antara elit dengan massa. Studi tersebut juga menunjukkan hadirnya kekuasaan oligarkhis yang terbangun padadiri elit lokal yang sedemikian kokoh sehingga sulit untuk dikontrol oleh massa. Menyusul tumbang nya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998, sistem politik mengalami perubahan dan era reformasi memberi peluang bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Proses demokratisasi yang salah satunya terejawantahkan penerapan asas

¹⁸Ibid. Hlm. 12

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang mengguncang keberadaan dan peran elit politik lokal yang telah mapan sepanjang rezim Orde Baru berkuasa. Di era demokratisasi dan desentralisasi untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi sebagai elit politik lokal harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relative ketat di antara individu-individu yang mengincar posisi tersebut. Hal ini tidak terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa, di mana peran Negara sedemikian dominan, kemunculan dan peran elit politik lokal tidak bebas dari campur tangan pemerintah.¹⁹

Pada era otoritarian Orde Baru elit politik lokal lebih sering memainkan peran untuk mewujudkan kepentingan pemerintah pusat ketimbang merealisasikan kepentingan dan kebutuhan daerah. Elit politik lokal cenderung melakukan peran sebagai perpanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengkooptasi masyarakat.²⁰ Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya perubahan peta politik Indonesia, dan dapat dibaca sebagai titik awal pelemahan peran negara di satu sisi dan menguatnya control masyarakat pada sisi yang lain. Seiring berlangsungnya perubahan peta politik tersebut, keberadaan dan peran elit politik lokal tidak lagi sepenuhnya ditopang dan tergantung negara. Di era demokratisasi mereka mempunyai kesempatan untuk tidak lagi berperan sebagai perpanjangan tangan negara (pemerintah pusat). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, menarik untuk mencermati keberadaan dan peran elit politik lokal. Tumbangnyarezim Orde Baru menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elit

¹⁹Haryanto. Elit Lokal dalam perubahan Sosial Politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 2, November 2009. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Hal 133

²⁰Ibid

politik lokal untuk mengekspresikan keberadaan dan perannya yang sebelumnya terkungkung dominasi pemerintah. Melemahnya peran negara yang diikuti dengan berkembangnya situasi kondusif bagi demokratisasi, menjadikan elit politik lokal berupaya secara mandiri untuk tetap dapat 'survive'. Elit politik lokal harus mampu membangun pijakan baru sebagai basis kekuasaannya untuk menopang posisinya, hal ini karena mereka tidak mungkin lagi menyangkan diri pada negara yang semakin lemah kontrolnya.²¹

Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa keberadaan dan peran elit politik lokal tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Perubahan yang terjadi pada sistem politik membawa pengaruh selain terhadap hubungan antara elit dengan massa, juga terhadap hubungan antara elit dengan negara. Perubahan yang berlangsung menjadikan massa tidak lagi sebagai obyek yang pasif dalam hubungannya dengan elit. Demikian pula elit untuk mempertahankan posisinya tidak bias hanya dengan menyangkan pada negara (pemerintah), tetapi harus mampu melakukan kalkulasi taktis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa di kalangan internal elit berlangsung dinamika, di mana masing-masing individu elit saling bersaing untuk mempertahankan posisi dan peranannya. Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan sistem politik, elit politik lokal harus mampu menyusun strategi untuk bisa meraih dan mempertahankan posisi dan perannya.²²

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 95 Kepala Desa dengan Lembaga Adat merupakan mitra dari Pemerintahan Desa dalam urusan

²¹ Ibid. hal 134-135

²² Ibid. hal 135

mengenai adat istiadat dan budaya setempat. Sebagai mitra harusnya Kepala Desa dengan Lembaga Adat harus dapat bekerja sama, berkoordinasi dengan intens, agar penyelenggaraan pemerintahan desa bisa menjadi lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksud ialah dalam pelaksanaan tugas, hak dan wewenang Kepala Desa sebagai pimpinan desa dan pelaksanaan tugas, hak wewenang Ketua Adat sebagai panutan warga Desa. Kedudukan Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat sebagai ketua di Desa, menimbulkan ego tersendiri terhadap kedua lembaga. Apalagi jika pemahaman tentang pemerintahan masih minim seperti pemahaman tentang status dan kedudukan Kedua Lembaga.²³

Eksistensi Elit Lokal di tengah Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa akan berjalan efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa jika dilandasi oleh kedua aspek penting yaitu aspek kerja sama, dan koordinasi. Adapun penjelasan rinci tentang kedua aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Kerja Sama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Hadari Nawawi²⁴ kerjasama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan. Ada tiga bentuk-bentuk jenis kooperasi (kerjasama) yang didasarkan perbedaan di dalam organisasi, group atau di dalam sikap grup, yaitu :

²³ Journal.ip.fisip-unmul.ac.id. Kerjasama,koordinasi kepala Desa dengan lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

²⁴ Engkoswara dan aan Komariah, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2012..hlm.50

a. Kerjasama primer.

Di sini grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam group itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitive dan lain-lainnya²⁵. Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi yang terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim daripada bekerja sendiri sebagai perorangan.²⁶

b. Kerjasama sekunder.

Apabila kerjasama primer karakteristiknya ada masyarakat primitif, maka kerja sama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerja sama sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membaktikan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualitis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama

²⁵ Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 101.

²⁶ J. Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38.

dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.²⁷

c. Kerjasama tertier.

Dalam hal ini yang menjadi dasar kerjasama yaitu adalah konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang kerja sama adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.²⁸

Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.²⁹

2. Aspek Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan

²⁷ Abu Ahmadi, Op. Cit, hlm. 102.

²⁸ Ibid, hlm. 102

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban yang dimaksud hanya dapat terlaksana melalui perantara individu, maka agak sukar untuk memisahkan secara tegas antara pengertian status dan status sosial.³⁰

Dasar lapisan masyarakat menurut Soerjono Soekanto³¹ di antara lapisan atas dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak, akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan. Dasar pelapisan status sosial tersebut³²

3. Aspek Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari kata inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang

³⁰ Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hal. 239-240

³¹ Ibid. hal. 237

³² Polak, J.B.A.F. Maijor. (1985). Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas. Jakarta: Ikhtiar Baru. hal. 167

mempunyai arti mengatur. Menurut Hasibuan koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.³³ Koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah, yaitu Sebagai proses input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber informasi(sender) menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (reciever). Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu dan memberikan feedback kepada sender serta receiver dapat memberikan tanggapan balik dan seterusnya .³⁴

Pencapaian koordinasi yang optimal sangat tergantung pada pemenuhan proses koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan ³⁵terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu: a) sense of cooperation (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang perorang, b) rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan, c) team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai, dan d) esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

³³Hasibuan, Malayu S.P. 2007 Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara: Jakarta.hal. 86

³⁴Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal. 296

³⁵ Hasibuan, Malayu S.P. 2007, loc. cit.hlm 88

Unsur-unsur Koordinasi Kencana³⁶ adalah sebagai berikut :

- a) Pengaturan
- b) Sinkronisasi
- c) Kepentingan Bersama

Menurut Awaluddin Djamin koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Fungsi Kepala Adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena fungsi Kepala Adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik – baiknya

³⁶ Syafiie, Inu Kencana. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta:Rineka Cipta. Hal 167

4. Memperhatikan setiap keputusan–keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu–satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.³⁷

Soepomo dalam buku karangan yang berjudul “Bab –Bab Tentang Hukum Adat” mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.
2. Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa pertanahan sehingga hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berperan untuk membetulkan keseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali
3. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun keputusan

³⁷ Soebakti, Poespanoto K. Ng. 1981. Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradya Paramitha. Cetakan ke-6. Hlm.225.

tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dapat melaksanakan perbuatan selalu sesuai peraturan yang telah diputuskan.³⁸

³⁸Soepomo.loc. cit.hlm 88